

WARTA Sertifikasi

Edisi 11 - September 2021



**SDM Berkualitas Kunci
Industri Pembiayaan
Jaga Kepercayaan
Masyarakat**

VISI

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang unggul dalam upaya mendukung industri pembiayaan yang sehat dan kuat.

MISI

- Menyediakan Skema Sertifikasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan di industri pembiayaan.
- Menjalankan Sertifikasi dan Uji Kompetensi secara tidak berpihak.

TUJUAN SERTIFIKASI

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di industri pembiayaan.

Meningkatkan pemahaman akan manfaat dari produk dan jasa perusahaan pembiayaan di masyarakat.

Ikut serta dalam meningkatkan peran industri pembiayaan dalam pembangunan.

MANFAAT SERTIFIKASI

Manfaat bagi pemegang sertifikat :

Meningkatkan kompetensi.

Meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya.

Pengembangan diri untuk karir yang lebih baik dalam industri.

Manfaat bagi perusahaan dan industri pembiayaan :

Salah satu alat ukur penting dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan.

Kontribusi positif dari peningkatan kompetensi karyawan.

Industri pembiayaan menjadi lebih baik, sehat, dan semakin maju.

Redaksional

Pemimpin Umum:

Andryan Harris

Redaktur Pelaksana:

Andryan Harris

Sekretaris Redaksi:

Cindy Olivia

Kantor Redaksi

Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka)
Tower A, Lantai 7, Unit C
Jl. Casablanca Kav. 88.
Jakarta Selatan
Telp : 021 2982 0180
Email : info@sppi.co.id

Dalam segala sektor kehidupan, kemampuan beradaptasi yang baik telah terbukti menjadi modal kuat untuk bertahan. Hal ini berlaku pula pada industri pembiayaan. Apalagi saat ini kita berada di tengah periode di mana disrupsi digital begitu kuat dan tantangan yang hadir semakin beragam. Sejarah pun telah membuktikan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Segala tuntutan perubahan tersebut memaksa semua unsur di dalamnya bertransformasi menjadi sesuatu yang sesuai dengan zaman, terutama sumber daya manusia.

Tentunya tantangan perubahan jaman tersebut harus di kelola dengan baik supaya kita semua mampu dengan baik mengatasinya. Perubahan itu saat ini sedang terjadi di industri pembiayaan yang kita cintai ini. Salah satunya terkait dengan kewajiban sertifikasi dalam POJK 35/2018 dan Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam POJK 11/2021.

Regulator berusaha mengatur tata laksana LSP supaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di industri menjadi terstandar dan terkelola dengan baik menuju arah sesuai cetak biru pengembangan sumber daya manusia yang di rumuskan oleh OJK. Dengan demikian LSP dapat mempertanggungjawabkan seluruh proses sertifikasinya sudah sesuai dengan tata laksana tersebut sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) industri termasuk masyarakat.

Kami sendiri didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang diakui oleh regulator. Visi kami menjadi LSP bidang pembiayaan yang unggul dalam upaya mendukung industri pembiayaan yang sehat dan kuat adalah amanat dan cita – cita besar bersama dari regulator, APPI dan seluruh pemegang kepentingan (*stakeholder*). Amanat dan cita – cita besar tersebut tentulah bukanlah perkara mudah. Semua pihak harus berjalan se-iring se-irama, berkesinambungan dan berkerja sama dalam satu sinergi yang kuat untuk mewujudkannya demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.



Tentunya tantangan perubahan jaman tersebut harus di kelola dengan baik supaya kita semua mampu dengan baik mengatasinya. Perubahan itu saat ini sedang terjadi di industri pembiayaan yang kita cintai ini. Salah satunya terkait dengan kewajiban sertifikasi dalam POJK 35/2018 dan Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam POJK 11/2021.

5 Sajian Utama



**SDM Berkualitas Kunci
Industri Pembiayaan**

**JAGA KEPERCAYAAN
MASYARAKAT**

Industri pembiayaan (*multifinance*) menjadi salah satu lembaga jasa keuangan (LJK) yang paling ketat dalam menyoroti kepatuhan para pemain terhadap sertifikasi dan tata laksana operasional.

8



Ayo Sertifikasi Online



9

NEWS

**OJK Memberikan Nafas
Tambahan Melewati Pandemi**



10 **NEWS**

**MK Tegaskan Eksekusi
Jaminan Fidusia lewat
Pengadilan Hanya Alternatif**

11

**Ketentuan
Pengumpulan
Poin Penyegaran
(Refreshment Point)**

12

**KEGIATAN
ONLINE METING**

13

**LENSA FOTO
Kegiatan Ujian
Sertifikasi**

16



**Kalender Sertifikasi
LSPPI**

17



**Peserta
Sertifikasi Terbaik**



SDM Berkualitas Kunci Industri Pembiayaan

JAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Adapun dalam upaya memperketat aturan di industri keuangan, OJK telah menerbitkan POJK 11/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Transformasi digital dunia finansial, tata kelola risiko yang semakin menantang, hingga dinamika global membuat kompetensi SDM perlu ditingkatkan. Penerbitan POJK tersebut ditujukan untuk mewujudkan LJK yang berkelanjutan, stabil, dan kontributif, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud, yaitu melalui sertifikasi kompetensi kerja yang sesuai

dengan kebutuhan industri jasa keuangan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di sektor jasa keuangan secara berkesinambungan, diperlukan pengaturan penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di sektor jasa keuangan.

Adapun melihat jauh ke 2015, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) tercatat sebagai pendiri PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (dikenal juga dengan LSP Pembiayaan Indonesia)

Sampai kini, LSPPI sudah melaksanakan sertifikasi kompetensi kepada lebih dari 110.000 orang dengan sebagian besar di antaranya berprofesi dalam bidang penagihan. Selain itu juga ada sertifikasi untuk dasar manajerial, komisaris, dan ahli pembiayaan (direksi).

Saat ini LSP yang telah terdaftar di OJK memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan sertifikasi secara berkelanjutan di sektor jasa keuangan, menyampaikan pengkinian data sertifikasi kepada OJK, dan melakukan penyesuaian skema sertifikasi sesuai dengan SKKNI terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan KKNi terkini yang ditetapkan oleh OJK.

Kepala OJK Institute, Agus Sugiarto menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah merumuskan bagaimana pelaku LJK membina SDM dalam Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. "POJK terbaru ini terkait administratif penatausahaan Lembaga Sertifikasi Profesi, kita hanya mengatur semua yang melakukan sertifikasi di sektor jasa keuangan wajib terdaftar di OJK.

"Namun memang ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pengembangan SDM kita padatkan di cetak biru, di mana misi ke-4 itu memang untuk mendukung transformasi digital," jelasnya.

Agus melanjutkan bahwa pengetatan tata kelola memang penting, karena OJK melihat faktor teknologi merupakan faktor utama yang

mempengaruhi transformasi digital di sektor jasa keuangan. Untuk merespons perubahan perilaku konsumen, sektor jasa keuangan perlu SDM yang kompeten dalam rangka meningkatkan kualitas dan ragam layanan produk jasa keuangan yang berbasis teknologi digital.

Adopsi teknologi digital mengakibatkan terjadinya perubahan kebutuhan profesi pada sektor jasa keuangan. Beberapa profesi yang bersifat manual akan semakin berkurang kebutuhannya, sebaliknya akan muncul beberapa profesi baru yang sebelumnya tidak ada. "Jadi program pengembangan SDM di sektor jasa keuangan harus mengantisipasi kemungkinan munculnya profesi-profesi baru," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi *big emerging market*, karena potensi besar yang dimiliki oleh sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, salah satu pilar pendukung dari peran serta sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional adalah pengembangan SDM yang perlu mendapatkan perhatian khusus dengan cara dioptimalkan secara berkesinambungan. Aspek pengembangan SDM juga menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar yakin dana yang diserahkan akan dikelola dengan baik, akuntabel, dan dalam kerangka kehati-hatian.





SALAH SATU PILAR PENDUKUNG DARI PERAN SERTA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL ADALAH PENGEMBANGAN SDM YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN KHUSUS DENGAN CARA DIOPTIMALKAN SECARA BERKESINAMBUNGAN.

Sejalan dengan perspektif itu, OJK melihat pengembangan SDM telah berlangsung dengan baik yang didukung sepenuhnya oleh komitmen dari seluruh pelaku industri jasa keuangan. “Pengembangan SDM berlangsung sejalan dengan dinamika perkembangan jasa dan produk industri jasa keuangan, termasuk perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan yang begitu luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang layanan jasa keuangan,” katanya.

Dia menuturkan transformasi digital di sektor jasa keuangan tidak hanya berdampak pada pengembangan infrastruktur saja, tetapi juga harus diikuti dengan pemenuhan kompetensi SDM sektor jasa keuangan agar teknologi digital yang digunakan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Secara khusus, Nurhaida memuji peran Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI) yang secara adaptif menerapkan ujian secara online selama masa pandemi sehingga proses pelatihan dan sertifikasi tetap dapat berjalan secara normal.

“Kami tetap berharap LSPPI terus meningkatkan standar sertifikasi sejalan dengan perkembangan yang terjadi, termasuk teknologi digitalisasi dan OJK akan akomodatif untuk memastikan proses sertifikasi oleh LSPPI tetap berjalan efektif,” jelasnya.

OJK meyakini bahwa kebutuhan untuk melakukan pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan dan pelaksanaan sertifikasi merupakan wujud konkret penciptaan SDM yang profesional dan memiliki daya saing regional hingga global.

“Kami sangat berharap agar LSPPI, yang didirikan oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia), juga memiliki semangat dan visi misi yang sama. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh LSPPI harus mengacu pada skema sertifikasi, yang telah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),” katanya.

Regulator akan terus mendorong LSPPI agar meningkatkan kualitas dan efektivitas program sertifikasi di bidang pembiayaan sehingga SDM di industri pembiayaan memiliki kompetensi tinggi dan keunggulan kompetitif. (*)



DAFTARKAN SEGERA



UJIAN ONLINE

DIKLAT ONLINE

TANGGAL TUTUP
PENDAFTARAN

Manajerial

11 NOV 2021

4 - 10 NOV 2021

25 OKT 2021

Direksi
& Komisaris

ENG

27 OKT 2021

26 - 27 OKT 2021

14 OKT 2021

IND

17 NOV 2021

16 - 17 NOV 2021

4 NOV 2021

Profesi Penagihan
oleh Perusahaan
Pembiayaan

Sejak **2017**, perusahaan pembiayaan sudah dapat mendaftarkan sendiri ujian **Sertifikasi Profesi Penagihan** setiap **Senin s/d Sabtu** pukul **08.00 - 19.00** (5 sesi pilihan).

TANPA LIMIT JUMLAH PESERTA (UNLIMITED)

#AyoSertifikasiOnline



INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:

021-29820180

info@sppi.co.id



OJK Memberikan Nafas Tambahan Melewati Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan angin segar dengan memberikan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit yang jatuh tempo pada Maret 2022. Hal ini akan memberikan nafas baru bagi pelaku usaha dan juga industri keuangan.

Otoritas sebelumnya telah satu kali memperpanjang kebijakan restrukturisasi, yang pada awalnya berlaku hingga Maret 2021. Hal itu diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 untuk restrukturisasi kredit di sektor perbankan dan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 untuk restrukturisasi pembiayaan di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Sementara itu, debitur-debitur restrukturisasi yang terdampak Covid-19 berdasarkan ketentuan POJK 58/2020, saat ini masih dapat dilaporkan dalam kategori kualitas Lancar. Namun OJK meminta multifinance secepatnya mempertimbangkan langkah yang tepat, sehingga apabila periode restrukturisasi benar-benar berakhir, perusahaan sudah siap dan kualitas piutang pembiayaan tidak memburuk.

Sebagai informasi, berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) per 28 Juni 2021, permohonan restrukturisasi yang diterima 167 multifinance yang ikut mensukseskan kebijakan tersebut mencapai 5,75 juta kontrak pembiayaan, dengan nilai outstanding pokok Rp180,92 triliun dan bunga Rp48,87 triliun.

Permohonan yang disetujui mencapai 5,13 juta kontrak dengan nilai pokok Rp164,42 triliun dan bunga Rp44,76 triliun. Adapun, yang ditolak sebanyak 352.897 kontrak dengan nilai pokok Rp8,91 triliun dan bunga Rp2,28 triliun. Sisanya, atau sebanyak 261.185 kontrak masih dalam proses.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengungkapkan realisasi program restrukturisasi kredit terbilang sukses untuk ikut menjaga kualitas piutang dari multifinance.

Pasalnya, restrukturisasi biasanya hanya direkomendasikan untuk debitur yang masa cicilannya sudah lama. Sementara debitur yang baru memulai kontrak pembiayaan, tapi benar-benar terdampak pandemi dan tidak kuat membayar cicilan, kebanyakan diarahkan untuk pengembalian unit secara baik-baik disertai kompensasi.

Pada awal kuartal III/2021 ini, debitur yang kontrak pembiayaannya mendapatkan restrukturisasi berupa penangguhan pembayaran cicilan atau pembayaran pokok tanpa bunga untuk sementara waktu, lebih dari separuhnya sudah kembali membayarkan kewajibannya secara penuh.

Akan tetapi lonjakan kasus Covid-19 dan pembatasan mobilitas masyarakat sejak Juli 2021 masih menjadi momok. Industri keuangan perlu mengamati kondisi dengan seksama. (*)

MK Tegaskan Eksekusi Jaminan Fidusia lewat Pengadilan Hanya Alternatif

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Hal itu disebutkan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang merupakan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Joshua Michael Djami.

Joshua yang merupakan karyawan di perusahaan finance dengan jabatan kolektor internal itu meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia

Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, di mana dalam putusan tersebut terdapat sejumlah kalimat yang bersifat multitafsir.

"Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi tanpa putusan pengadilan dan ada yang mengatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," tulis MK, dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/9/2021).

Namun demikian, MK dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 menyatakan,

pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dan bukan kewajiban.

"Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur," tulis aturan tersebut.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi penjelasan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia atas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang sempat menimbulkan adanya perdebatan akibat multitafsir.

Menanggapi hasil putusan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno mengatakan, pihaknya menghormati dan mengapresiasi putusan yang telah diumumkan oleh MK.

"Diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia," ucap dia. (*)

Ketentuan Pengumpulan Poin Penyegaran (*Refreshment Point*)

Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)

Wajib memenuhi 10 poin dalam waktu
1 tahun periode.

Sertifikasi Dasar Komisaris (Komisaris)

Wajib memenuhi 5 poin dalam waktu
1 tahun periode.

PENJELASAN UMUM :

1 Tahun periode adalah Januari s/d Desember.
Pengumpulan poin dimulai tahun berikutnya setelah tahun bersertifikat.

CONTOH :

- Peserta bersertifikat pada Mei 2017
- Pengumpulan poin dimulai dari Januari 2018 - Desember 2018
- Jika belum terpenuhi, maka di periode kedua Januari 2019 - Desember 2019 wajib memenuhi kekurangan poin secara akumulasi (20 poin untuk Sertifikasi Ahli Pembiayaan dan 10 poin untuk Sertifikasi Dasar Komisaris)
- Jika masih belum terpenuhi total akumulasi kewajiban poin dalam dua periode tersebut, maka peserta **wajib mengikuti seminar dan ujian sertifikasi kembali.**

METODE PENGUMPULAN & BESAR NILAI POIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:



Ikut serta dalam seminar/workshop/pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh OJK dan atau APPI.



Ikut serta dalam publik seminar/workshop/pelatihan/kursus bidang Industri keuangan yang diselenggarakan BUKAN oleh OJK dan atau APPI serta bukan diselenggarakan oleh internal/group perusahaan.



Menjadi pembicara/instruktur/pengajar dalam kegiatan seminar/workshop/pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh OJK dan atau APPI.



Menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain di bidang industri keuangan yang di publikasikan umum melalui media masa bukan media internal/group/asosiasi.

KETENTUAN UMUM :

- Keputusan LSPPPI bersifat final.
- Bukti pengumpulan poin wajib dikirimkan ke email : point@spipi.co.id
- Bukti pengumpulan poin adalah sertifikat partisipasi, sertifikat pembicara, dan buku/karya tulis.
- Batas akhir menyerahkan bukti pengumpulan poin setiap periode, selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.
- Ketentuan ini berlaku efektif sejak 01 Januari 2018.

31
Agustus
2021



**Online meeting LSPPI – PT Mega Auto Finance /
PT Mega Central Finance.**

07
September
2021



Online meeting LSPPI – PT Clipan Finance Indonesia

10
September
2021



**Online meeting LSPPI – PT Bussan Auto Finance,
PT Kobus Smart Service – BAF, PT Swakarya Insan Mandiri – BAF,
PT Swapro International – BAF.**



JULI 2021

Ujian Sertifikasi Profesi Pembiayaan Online



Ujian Sertifikasi Dasar Manajerial Online





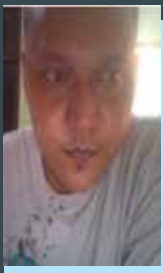
JULI 2021

Ujian Sertifikasi Ahli Pembiayaan & Dasar Komisaris Online



AGUSTUS 2021

Ujian Sertifikasi Profesi Pembiayaan Online





AGUSTUS 2021

Ujian Sertifikasi Dasar Manajerial Online



Ujian Sertifikasi Ahli Pembiayaan & Dasar Komisaris Online



Kalender Sertifikasi



JANUARI

01

FEBRUARI

02

MARET

03

APRIL

04

20 Januari:
SDM Online

22 Januari:
SAP & SDK Online
- Indonesia

10 Februari:
SDM Online

19 Februari:
SAP & SDK Online
- English

10 Maret:
SDM Online

26 Maret:
SAP & SDK Online -
Indonesia

14 April:
SDM Online

23 April:
SAP & SDK Online -
English

MEI

05

JUNI

06

JULI

07

AGUSTUS

08

28 Mei:
SAP & SDK Online -
Indonesia

16 Juni:
SDM Online

25 Juni:
SAP & SDK Online -
English

15 Juli:
SDM Online

23 Juli:
* SAP & SDK Online -
Indonesia

9 Agustus:
SDM Online

27 Agustus:
SAP & SDK Online - English

SEPTEMBER

09

OKTOBER

10

NOVEMBER

11

DESEMBER

12

15 September:
SDM Online

24 September:
SAP & SDK Online -
Indonesia

19 Oktober:
SDM Online

22 Oktober:
SAP & SDK Online -
English

11 November:
SDM Online

19 November:
SAP & SDK Online -
Indonesia

8 Desember:
SDM Online

17 Desember:
SAP & SDK Online -
English

Keterangan:

- SPP adalah Sertifikasi Profesi Penagihan
- SDM adalah Sertifikasi Dasar Manajerial

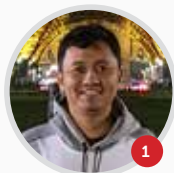
- SDK adalah Sertifikasi Dasar Komisaris
- SAP adalah Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)

Selamat

Atas Keberhasilan Pencapaian Nilai Ujian Sertifikasi

Bulan Juli 2021

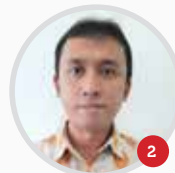
Sertifikasi Dasar Manajerial



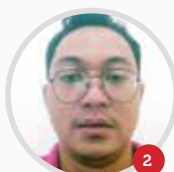
Andes Saputra
Mandiri Tunas Finance
Brand Manager



Agustina Vitra Kurniani
BFI Finance Indonesia
Consumer Credit Head



Dimas Bagus Satrio Aji
BFI Finance Indonesia
Area Manager



Muhamad Fauzi Purnama
BFI Finance Indonesia
Area Manager



Rangga Prajawantara Spd
Wahana Ottomitra Multiartha
NDS Car Networking Department Head



Andrew Tjung
Wahana Ottomitra Multiartha
IT Service Delivery Deputy Division Head



Dameria Roselin Hutapea
BFI Finance Indonesia
IT Vendor Management Head



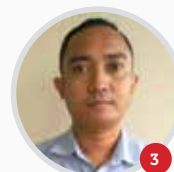
Dinda Lesmana
BFI Finance Indonesia
Operation Project Monitoring Head



Mochamad Irfan Handoko
BFI Finance Indonesia
NDF Motorcycle Manager

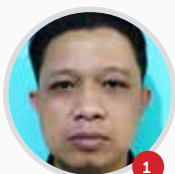


Toni Hanafir Nanda
BFI Finance Indonesia
Tele Operation Head



Yoyok Desiandi Sukanto
BFI Finance Indonesia
Audit Investigation Head

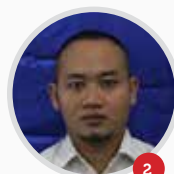
Sertifikasi Profesi Penagihan



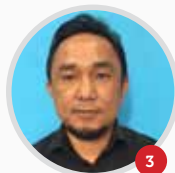
Jatmiko Nowo Wibowo
Wahana Ottomitra Multiartha
Collection Supervisor



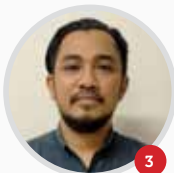
Firdaus
BFI Finance Indonesia
Branch Asset Management
Supervisor



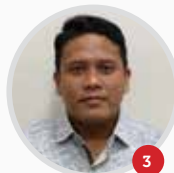
Didin
BFI Finance Indonesia
Back End Asset Management
Motorcycle



Arifudin
BFI Finance Indonesia
Back End Asset Management Mix



Mochamad Ibnu Fathoni
Federal International Finance
Remedial Coordinator



M Maqfur Erwanda Lucas
Federal International Finance
Collection Coordinator

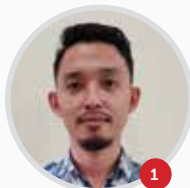


Raja Syahnun Rambe
Wahana Ottomitra Multiartha
Branch Collection Head

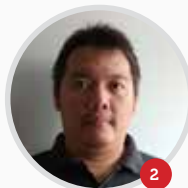
Selamat

Atas Keberhasilan Pencapaian Nilai Ujian Sertifikasi

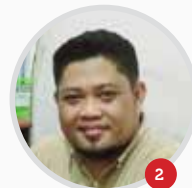
Bulan Agustus 2021



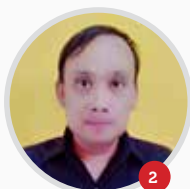
Yoli Morista
Mega Central Finance
Kepala Cabang



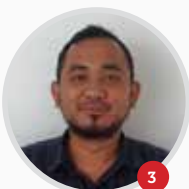
Pegi Dalu Argie
BFI Finance Indonesia
Audit Development Assurance Head



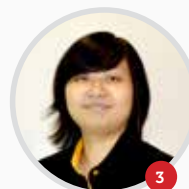
Jafar
Mega Central Finance
Koordinator Kolektor



Saeful Aziz
Mega Central Finance
Kepala Cabang



Rendy Dwi Sapta
BFI Finance Indonesia
Risk Development Head



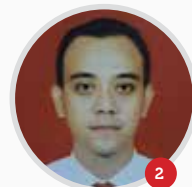
Fenaria Herdiyanti
Adira Dinamika Multi Finance
Head of Portfolio Policy



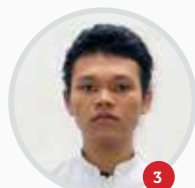
Nurman Syahbana
BCA Finance
Area Recovery Consultant Bogor



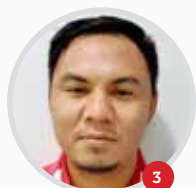
Irwan Pawae
BCA Finance
Professional Collector



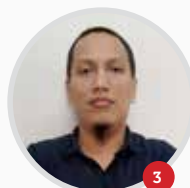
Rizal Awandhana
Clipan Finance Indonesia
Problem Account Officer 2



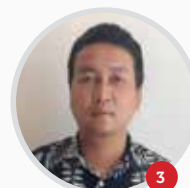
Gafil Endi Pramanta
Bussan Auto Finance
ARO



Yudi Irawan
Federal International Finance
Collection Section Head



Henry Setiya Putra
Federal International Finance
Collection Section Head



M Syaifuddin
Sinar Mitra Sepadan Finance
Branch Collection Supervisor



Mochamad Yusuf
Summit Oto Finance
Field Collection SOF



Erzad Sukoco
Kobus Smart Service - BAF
ARO

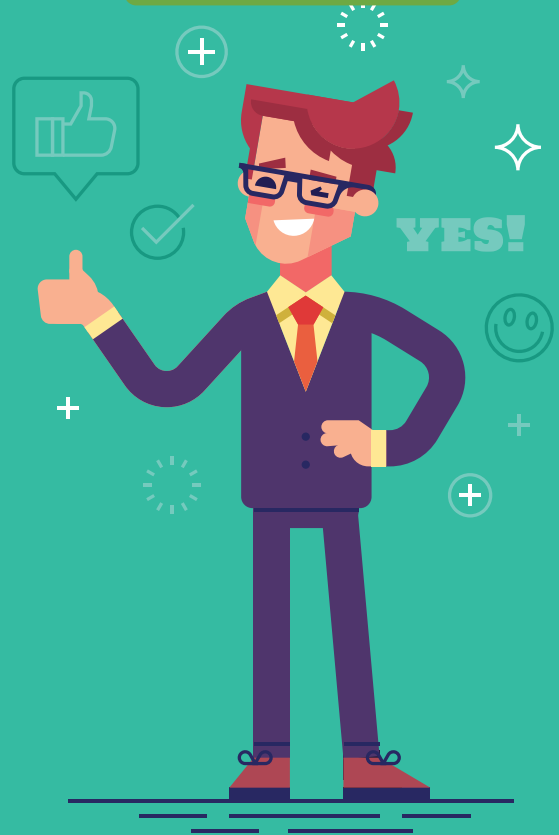
Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat

TANPA SURAT REFERENSI



- ☑ Sistem Informasi LSPPI memfasilitasi perusahaan pembiayaan dengan menu referensi pengunduran diri karyawan nya yang sudah bersertifikasi yaitu dengan pilihan "Dengan Surat Referensi (DSR)" atau "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- ☑ Bila pegawai perusahaan tersebut berhenti baik - baik dan tidak bermasalah, maka perusahaan dapat melepaskan keterikatan data sertifikasi pegawai tersebut dengan status "Dengan Surat Referensi (DSR)".
- ☑ Sebaliknya bila pegawai tersebut terbukti melakukan tindakan *fraud* maka dapat dilepaskan dengan pilihan "Tanpa Surat Referensi (TSR)".

DENGAN SURAT REFERENSI



- ☑ Fasilitas ini adalah sarana komunikasi pasif antara perusahaan pembiayaan karena seluruh data pegawai yang masuk dalam DSR/TSR ini dapat dilihat oleh seluruh perusahaan pembiayaan lainnya.
- ☑ Perusahaan pembiayaan dapat memanfaatkan menu pengunduran diri ini sebaik mungkin dan berkomitmen untuk hanya merekrut pegawai yang sudah tersertifikasi dengan status DSR, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun integritas karyawan dan akhirnya membuat industri pembiayaan semakin maju dan baik.

Maulid Nabi Muhammad SAW

12 RABIULAWAL 1443 H



MAY WE GET BLESSINGS ON THIS
WONDERFUL DAY